

Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat

Zurayna Sari

Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Korespondensi : sarizurayna@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana banjir. Sehingga, pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) tahun 2012-2017 yang salah satunya berisi fokus program dan kegiatan perlindungan masyarakat bencana banjir terdiri dari 7 program dan 20 kegiatan. Sejak tahun 2012, program dan kegiatan tersebut mengalami banyak hambatan dalam implementasinya. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektifitas implementasi program penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif kualitatif. Untuk mendukung evaluasi efektifitas dilakukan observasi dan wawancara dengan narasumber terkait serta pengumpulan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program penanggulangan bencana banjir tidak efektif dikarenakan tidak terlaksananya semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya kemampuan instansi pelaksana dan peralatan, serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar instansi pelaksana.

Kata-kunci : Evaluasi, Penanggulangan Bencana Banjir, Program

Pendahuluan

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah dengan kondisi alam yang sangat beragam sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam seperti banjir. Banjir adalah tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu, 2009). Hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat pernah mengalami banjir, yang di sebabkan oleh keadaan fisiografi yang memiliki banyak sungai besar dan sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Barat landai. Kabupaten Aceh Barat mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni Woyla dan Meurebo yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat. Hampir setiap tahun Kabupaten Aceh Barat mengalami bencana banjir. Bencana banjir ini menimbulkan dampak seperti timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, terjadinya gangguan kesehatan,

kerusakan prasarana dan sarana, terjadinya krisis pangan, dan terhentinya aktivitas perekonomian warga.

Kondisi Kabupaten Aceh Barat yang sering dilanda bencana banjir, mengharuskan pemerintah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) tahun 2012-2017 yang merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik serta pengalokasian anggarannya. Ada 13 fokus penanggulangan bencana yang terdapat dalam rencana penanggulangan bencana tersebut, salah satunya adalah fokus program dan kegiatan perlindungan masyarakat bencana banjir. Terdapat 7 program dan 20 kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan bencana yang multi stakeholder dari tahun 2012 hingga 2017. Dalam perjalanannya sejak tahun 2012, program penanggulangan bencana banjir mengalami banyak hambatan pada tahapan implementasinya, seperti kurangnya kesia-siagaan petugas dan peralatan dalam menghadapi penanggulangan bencana banjir, terbatasnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir, para pengungsi mengeluhkan bantuan yang minim, serta petugas penolong belum mampu mengevakuasi masyarakat yang di perdalam karena sarana prasarana yang kurang memadai.

Banyaknya permasalahan yang terjadi hingga saat ini, program penanggulangan bencana banjir belum mampu memberikan *output* yang seharusnya terjadi dari setiap program tersebut. Salah satu unsur penting dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir Kabupaten Aceh Barat adalah dengan mengevaluasi program penanggulangan bencana banjir yang sudah dilakukan selama ini. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektifitas implementasi program penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deduktif kualitatif yang merupakan metode dimana peneliti sebagai alat untuk mendapatkan data yang mendalam dari berbagai program dan kegiatan, kejadian, proses maupun aktifitas penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh. Kemudian, setelah data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara komprehensif untuk semua variabel. Penyajian hasilnya disampaikan dalam bentuk kualitatif naratif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari 12 kecamatan. Variabel-variabel dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian (Firdaus, 2012). Adapun kriteria dan variabel penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria dan Variabel Penelitian

Kriteria evaluasi	Variabel	Indikator
Efektifitas	Pencapaian tujuan	Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan indepth interview. Narasumber dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan di lingkungan instansi Kabupaten Aceh Barat yang merupakan pelaksana program penanggulangan bencana banjir dan masyarakat dari seluruh kecamatan yang secara langsung merasakan dampak dari program penanggulangan bencana banjir. Teknik pengambilan sampel pada wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini termasuk dalam Non-Probability Sampling.

Teknik ini digunakan dalam memilih sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2011). Sedangkan pengumpulan data sekunder berasal dari dokumen, data-data statistik, peta-peta tematik dan data relevan lainnya yang digunakan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi program penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik yang menggunakan verifikasi dari teori dan data empirik yang diperoleh. Pendekatan deskriptif analitik yaitu pemaparan secara komprehensif, baik secara historis, hasil wawancara, hasil pengamatan dan kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis (Nugroho, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Kriteria efektifitas dalam evaluasi implementasi program penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat digunakan untuk menilai bagaimana realisasi ketercapaian program dan kegiatan berdasarkan tujuannya, serta mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi ketercapaian program dan kegiatan tersebut (Bappenas, 2009 dan OECD, 2010). Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Penilaian kriteria efektifitas pada evaluasi implementasi program penanggulangan bencana banjir didasarkan pada program dan kegiatan yang telah terlaksana dibandingkan dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Program penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat memerlukan waktu yang panjang untuk pelaksanaannya. Program penanggulangan bencana banjir telah ditetapkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan dari tahun 2012 hingga 2017. Program-program serta diikuti rangkaian kegiatan penanggulangan bencana banjir dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan utama penanggulangan bencana Kabupaten Aceh Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada 3 fokus, 7 program dan 20 kegiatan dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat direncanakan dan dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait seperti, BPBD, Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, dan BLHK.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara, dari 7 program dan 20 kegiatan penanggulangan bencana banjir, hanya 4 program dan 9 kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2012-2016. Tabel 2 adalah daftar program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir Kabupaten Aceh Barat yang sudah dilaksanakan. Program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat, meskipun pelaksanaannya tidak menyeluruh di seluruh kabupaten hanya dilokasi-lokasi tertentu saja. Dermawan selaku Kepala Subbagian Program dan Pelaporan BPBD mengatakan bahwa:

“Jika kita lihat RPB ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan butuh dana 35 m, sementara itu, pertahunnya kita hanya memperoleh 4,8 milyar, untuk gaji dan sebagainya hampir 3 milyar pertahun bagaimana kita mau melaksanakan ini. ini sebagian juga harus dilakukan oleh kantor lain, ini ada cipta karya, ada bappeda, kesehatan juga ikut”. (Dermawan - Kasubag Program Dan Pelaporan BPBD, hasil wawancara tanggal 5 Januari 2017).

Tabel 2. Program Dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat Yang Sudah Dilaksanakan

No	Program	Kegiatan
1	Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Zona Prioritas PB Banjir
		2. Pembangunan Tanggul Pengaman Banjir
		3. Normalisasi Sungai
2	Gladi dan Simulasi Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi	4. Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi Standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Banjir
		5. Kajian Cepat Bencana Banjir
		6. Pencarian, penyelamatan-an dan evakuasi
3	Tanggap Darurat	7. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		8. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9. Pengkajian Kerusakan dan Kerugian

Selain itu, Cut Hasanuddin yang merupakan Staf Pengelola Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa:

“Masih kurang koordinasinya terutama sama bpbd, masih kurang pertemuan, seperti saat banjir itu harusnya dipanggil untuk duduk, itu masih kurang tetapi koordinasi secara personal misalnya via telepon bagaimana kondisi banjir, di daerah mana saja, dimana ada pengungsi, itu mungkin komunikasi lewat radio”. (Cut Hasanuddin - Staf Pengelola Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan, hasil wawancara tanggal 25 Januari 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, tidak terlaksananya semua program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir disebabkan oleh keterbatasan dana dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu juga terkendala oleh peralatan seperti yang diungkapkan oleh Cut Marliza selaku Kepala Bidang Program Dinas Bina Marga :

“Terkendala dana, mungkin kalau dari tim trc terkendala dengan peralatan juga, karena kita baru membentuknya, sehingga dilakukan kerja-samanya dengan dinas dan perusahaan-perusahaan yg mempunyai material untuk pekerjaan. Sdm juga kita masih kurang”. (Cut Marliza-Kabid Program Dinas Bina Marga, hasil wawancara tanggal 18 Januari 2017).

Kurangnya dana, koordinasi antar instansi terkait dan peralatan serta kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi program dan kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu atau yang prioritas saja. Pada dasarnya realisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait tersebut terdapat pencapaian tujuan sesuai dengan perencanaan awal, seperti pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis yaitu perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan hunian sementara. Selain itu juga ada kegiatan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman.

Meskipun ada beberapa kegiatan yang sudah mencapai tujuan, namun tidak semua program dan kegiatan penanggulangan bencana banjir tercapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Selain itu juga, program dan kegiatan tersebut hanya dilaksanakan di lokasi-lokasi dan tahun-tahun tertentu saja. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, bahwa banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan di awal sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penanggulangan bencana.

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi berbanding terbalik dengan pernyataan Nugroho (2012) yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah kebijakan seharusnya efektif dengan ketercapaian tujuan dari kegiatan tersebut maksimal. Berdasarkan 7 program dan 20 kegiatan yang direncanakan, hanya 4 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pencapaian tujuan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, kriteria evaluasi efektifitas dinilai tidak terpenuhi dan artinya implementasi program penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Barat tidak efektif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, kurang-

nya koordinasi dan sosialisasi antar dinas-dinas bersangkutan, kurangnya prasarana dan sarana yang memadai dan kurangnya kualitas sumberdaya manusia pelaksana program dan kegiatan.

Kesimpulan

Efektifitas implementasi program penanggulangan bencana banjir yang dinilai dari pencapaian program dan kegiatan tidak efektif. Banyak program dan kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya menyebabkan tujuan dari program dan kegiatan tidak tercapai sehingga implementasi program penanggulangan bencana banjir tidak efektif. Dari 7 program dan 20 kegiatan yang direncanakan, hanya 4 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidak-efektifan implementasi program penanggulangan bencana banjir disebabkan oleh keterbatasan dana, kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar dinas-dinas bersangkutan, kurangnya prasarana dan sarana yang memadai dan kurangnya kualitas sumberdaya manusia pelaksana program dan kegiatan sehingga mengakibatkan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak terlaksana dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Bappenas (2009). *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial*. Jakarta: Bappenas.
- Rahayu, dkk. (2009). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Firdaus, M. A. (2012). *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OECD (2010, Februari 8). *Quality Standards For Development Evaluation*. <http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm>. (Diakses tanggal 27 Oktober 2016)
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. (2012). *Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016*. Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.